



Collaborative Governance: Studi Kasus Banten Creative Festival Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Kreatif di Kota Serang

Collaborative Governance: Case Study of Banten Creative Festival as an Effort to Improve the Creative Economy in Serang City

**Puput Mustika Sari¹, Galih Pramudya², Faiha Zayyan³, Laeli Nur Khanifah⁴,
Nasihuddin Al-Ulya⁵**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: puputmustika15@gmail.com¹, galihpramudya001@gmail.com², faihazayyan@gmail.com³,
khanifah92@untirta.ac.id⁴, nasihuddinalulya@gmail.com⁵

Article Info

Article history :

Received : 17-06-2025

Revised : 18-06-2025

Accepted : 20-06-2025

Published : 22-06-2025

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Collaborative Governance in the organization of the Banten Creative Festival (BCF) as an effort to enhance the creative economy and increase Local Own-Source Revenue (PAD) in Serang City. As the capital of Banten Province, Serang faces challenges in generating local revenue due to limited natural resources. BCF emerged as a collaborative initiative involving local government, private actors (Rumah Bersatu), creative communities, and MSMEs to stimulate economic growth through the creative sector. This research adopts a qualitative approach using a case study method and is analyzed through the Collaborative Governance framework developed by Ansell and Gash. The findings indicate that collaboration is shaped by four key indicators: starting conditions, facilitative leadership, institutional design, and collaborative process. BCF has demonstrated direct economic impacts, including the promotion of local products, MSME empowerment, and increased economic transactions. However, a major limitation lies in the absence of a strong regulatory framework, such as local regulations or binding legal agreements, which creates a vulnerability in ensuring the sustainability of the collaboration. Therefore, institutional strengthening, transparency, and long-term commitment among all actors are essential to support the sustainable development of the creative economy in Serang City.

Keyword: *Collaborative Governance, Banten Creative Festival (BCF), Creative Ekonomi*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan Banten Creative Festival (BCF) sebagai upaya peningkatan ekonomi kreatif dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Serang. Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten menghadapi tantangan minimnya PAD akibat keterbatasan sumber daya alam. BCF hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku swasta (Rumah Bersatu), komunitas kreatif, dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor kreatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dan dianalisis melalui teori *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang dianalisis melalui indikator *starting condition*, *facilitative leadership*, *institutional design*, dan *collaborative process*. BCF terbukti mampu menciptakan dampak ekonomi langsung berupa promosi produk lokal, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan transaksi ekonomi. Namun demikian, kelemahan utama terletak pada belum adanya kerangka regulasi yang kuat seperti peraturan daerah atau kontrak hukum yang mengikat. Hal ini menimbulkan kerentanan terhadap keberlanjutan kolaborasi di masa



depan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, transparansi, serta komitmen jangka panjang dari seluruh aktor menjadi kunci keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Kota Serang.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Banten Creative Festival (BCF), Ekonomi Kreatif

PENDAHULUAN

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Rindekraf) dipaparkan bahwa Ekonomi kreatif (Ekraf) adalah pengejawantahan *added value* dari suatu gagasan atau ide kekayaan intelektual yang memuat keautentikan, terbentuk dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, warisan budaya, serta keterampilan. Wujud pemerintah memperhatikan dalam menyediakan perkembangan ekonomi kreatif adalah dengan perubahan nomenklatur kementerian menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lalu Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2016 membentuk Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) (Yuliani et al., 2023). Selanjutnya, didukung dengan penetapan Peraturan Presiden Tentang Rindekraf Nasional Tahun 2018—2025 yang menjadi pedoman bagi pemerintah level pusat hingga desa (Ananda & Yudhistira, 2021; Yuliani et al., 2023).

Pengembangan ekraf bisa menjadi kekokohan ekonomi baru pada suatu daerah (Rahmadanti & Fitriana, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh (Utami & Sayyidi, 2023) menemukan bahwa di Kabupaten Jember telah sukses dalam menambah PAD Kabupaten Jember berkat strategi ekonomi kreatif yakni Jember *Fashion Carnaval*. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam pendanaan pembangunan dan pengembangan suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fitriano & Ferina, 2021).

Setiap sumber pendapatan yang ada di daerah seharusnya kembali lagi ke daerah untuk menunjukkan kemandirian secara otonom dalam penyelenggaraan pemerintah baik kecil atau besar. Berikut merupakan statistik PAD sebagai salah satu pendapatan utama pemerintah. Kota Serang merupakan salah satu daerah yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah di Provinsi Banten. Berbeda dengan daerah-daerah lainnya yang berada di Banten yang memiliki potensi besar penerimaan PAD baik dari segi pariwisata yang didorong dengan adanya sumber daya alam yang melimpah atau pendapatan dari pajak kawasan industri.

Tabel 1. PAD Di Kota/Kabupaten Di Provinsi Banten Tahun 2024

No	Kota / Kabupaten	Pendapatan Asli Daerah
1	Kota Serang	Rp206 miliar
2	Kota Cilegon	Rp1,2 triliun
3	Kota Tangerang	Rp4,85 triliun
4	Kota Tangerang Selatan	Rp4,57 triliun
5	Kabupaten Serang	Rp3,44 triliun
6	Kabupaten Tangerang	Rp4,3 triliun
7	Kabupaten Lebak	Rp466,910 miliar
8	Kabupaten Pandeglang	Rp172,7 miliar

Sumber: (BAPPEDA Provinsi Banten, 2024)

Berdasarkan tabel 1 di atas, terlihat ketimpangan pada Kota Serang, yang justru memiliki PAD yang relatif rendah meskipun berstatus sebagai ibu kota provinsi. Kota Serang berada kedua terakhir dalam jumlah penerimaan asli daerah yang ada di Kota/Kabupaten Provinsi Banten. PAD Kota Serang masih mengandalkan pajak dari restoran, hotel, rumah makan dan retribusi parkir, yang jumlahnya tidak sebanyak di Kota Tangerang Selatan. Dalam statistik diatas menunjukkan bahwa Kota Serang sebagai ibu kota “hanya” berhasil meraih angka Rp206 miliar, angka ini terbilang sangat kecil dibandingkan wilayah lainnya yang rata-rata sudah menyentuh Triliunan. Kondisi ini



mencolok karena sebagai pusat administrasi pemerintahan dan kebijakan di Banten seharusnya memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat.

Tabel 2. PAD Kota Serang Tahun 2021-2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2021	Rp206.238.434,81
2022	Rp364.829.416,95
2023	Rp276.319.721,25
2024	Rp294.921.983,23

Sumber: (BPS Kota Serang, 2024)

Melihat data tabel 2 di atas bahwa ada penurunan penerimaan PAD sejak tahun 2022 tentu bukan keadaan yang baik. Pemerintah harus melakukan inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah salah satunya adalah dengan menggandeng para pelaku ekraf di Kota Serang. *Stakeholder* berperan penting dalam mengembangkan potensi suatu daerah sehingga kolaborasi antar pemangku kepentingan mampu membenahi kompleksitas pengelolaan (Sandi et al., 2025).

Collaborative governance dalam pembangunan memperlihatkan bahwa pembangunan yang disertai keterlibatan seluruh unsur masyarakat dan *stakeholder* akan terlaksana dengan baik (Velby & Yuadi, 2023). Berkaitan dengan ekonomi kreatif di Kota Serang, terciptanya BCF adalah hasil kolaborasi antara pemerintah dan komunitas kreatif (PortalBanten, 2025). Kolaborasi antara pemerintah Kota Serang, Provinsi Banten, para pelaku ekonomi kreatif termasuk *band*, dan tim kreatifnya dalam BCF memiliki kepentingan dan visi yang sama yakni untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PortalBanten, 2025; Selatsunda, 2023).

Ekonomi kreatif di Kota Serang harus didukung secara maksimal oleh pemerintahan Kota Serang, berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 menyatakan bahwa dalam sektor ekraf pemerintah daerah harus bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan seperti bimbingan teknis, perizinan usaha, akses bantuan permodalan, dan akses pemasaran. Sebenarnya Kota Serang memiliki potensi besar dalam pembangunan ekraf, namun masalah yang terjadi yaitu banyak sektor yang belum berkembang dan luput dari perhatian pemerintah Kota Serang.

Tabel 3. Daftar Sektor Ekonomi Kreatif Yang Belum Berkembang di Kota Serang

No	Sektor	Alasan
1	Film, animasi dan video	Kota serang belum memiliki iklim atau ekosistem yang mendukung adanya produksi film yang konsisten dan tidak adanya bentuk apresiasi kepada pelaku produksi film seperti festival film lokal
2	Seni pertunjukan	minimnya para pelaku seniman lokal tradisional dan tidak adanya ruang ekspresi yang didukung langsung oleh pemerintah.
3	Fotografi	Tidak adanya wadah yang bisa mengapresiasi para pelaku usaha dibidang fotografi seperti pameran atau perlombaan resmi.
4	Desain	Para pelaku usaha desain baik seperti baju atau dalam hal lain sebenarnya sudah berkembang banyak di kota serang namun tidak ada konsistensi dari pelaku usaha dan minimnya perhatian pemerintah kota serang.

Sumber: (RRI.com, 2024)

Fenomena menjamurnya berbagai macam konser musik dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan semangat baru ekraf yang memudar pasca Covid-19 beberapa tahun lalu (Anggraini, 2024). BCF menjadi salah satu *event* pertunjukan di Banten yang berpotensi menjadi



pionir pertumbuhan ekonomi kreatif di masa yang akan datang (Affriyandy, 2025). Dalam RPJMN 2025-2029 Provinsi Banten masuk kedalam salah satu dari 15 daerah yang menjadi fokus pengembangan prioritas dalam ekraf (Provinsi Banten, 2025). Terdapat 17 subsektor ekraf di Banten. Kemunculan potensi ini dapat menjadi awal pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD yang terbilang sangat minim (Disporapar Paser, 2024; Muhlimi, 2024). Setiap tahunnya *event* BCF tersebut bisa berjalan selama sehari-hari dengan menyasar kepada seluruh kalangan yang menyukai musik, pertunjukan seni, kuliner hingga perbelanjaan pakaian.

Gambar 1. Pakaian yang dijual dalam BCF 2025 di Kota Serang



Sumber: (Antarafoto, 2025)

Selama penyelenggaraanya, BCF dikenal sebagai *event* tahunan yang menghadirkan berbagai pengalaman kreatif seperti menonton musik dari band ternama, wisata kuliner legendaris hingga pusat perbelanjaan produk fashion yang dihadiri lebih dari 80 *clothing brand* (Akurat, 2025). *Event* ini telah berlangsung di beberapa daerah dan daerah yang paling sering digunakan dalam *event* ini merupakan Ibu kota Provinsi Banten yaitu Kota Serang (Muhlimi, 2024). *Event* ini merupakan inisiasi yang dilakukan Rumah Bersatu selaku *Event Organizer* utama BCF bermula ketika tidak adanya industri kreatif yang menjadi pusat hiburan di kota ini.

Kota Serang termasuk sebagai wilayah pusat pemerintahan saja, tidak sebagai pusat ekonomi dan hiburan utama, karenanya masyarakat di kalangan anak muda memulai pergerakan baru dengan membuat *Event* ini sebagai upaya pengembangan industri hiburan utama. Pada awalnya, BCF hanya berfokus sebagai salah satu *event* bagi penggiat kreatif saja yang mulai menarik mata pemerintah setempat ketika melihat potensi dan atensi besar yang dihasilkan oleh *event* tersebut. Kondisi empiris yang terjadi dalam kehadiran BCF di Kota Serang menegaskan bahwa momentum memajukan ekonomi kreatif dapat dilakukan kapan saja apabila pemerintah dan komunitas mampu berinteraksi lebih mendalam seperti pada kasus kasus di wilayah lainnya, pentingnya komunikasi dan kebersamaan dalam pengelolaan kegiatan BCF sebagai salah satu tumpuan utama hiburan di Kota Serang menjadi penting untuk dilakukan, oleh karena itu, desakan ilmiah perlu dilakukan guna meyakinkan *multistakeholder* dan *social community* untuk berkolaborasi dalam kesempatan mendatang. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah **“Bagaimana Eksistensi Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Banten Creative Festival Sebagai Ekonomi Kreatif Baru di Kota Serang”**

KERANGKA TEORI

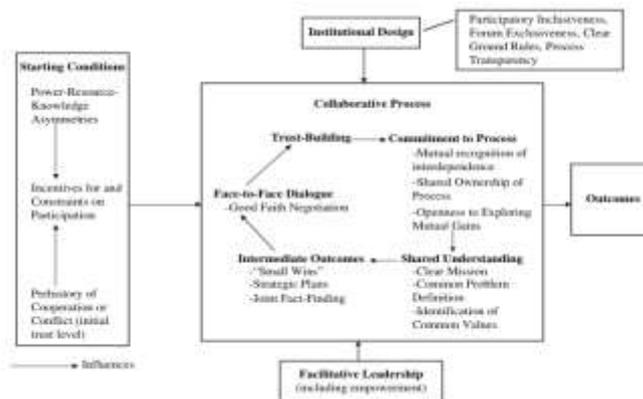
Konsep Collaborative Governance

Collaborative Governance yang dipopulerkan Ansell & Gash dalam (Ansell & Gash, 2008) dinyatakan sebagai kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan aktor non-negara dalam satu proses pengambilan keputusan kolektif dengan berorientasi pada kesepakatan dan



musyawarah dalam pengelolaan kebijakan atau program publik. Model ini juga menekankan beberapa kriteria penting diantaranya; forum diprakarsai oleh institusi publik, anggota forum melibatkan aktor non-negara, anggota turut andil dalam pengambilan keputusan, pengelolaan secara kolektif, kesepakatan sebagai tonggak pengambilan keputusan, kolaborasi berfokus pada program publik (Ezra & Santoso, 2024; Yulianto, 2025). Dengan begitu, *Collaborative Governance* tidak hanya melibatkan satu komponen, melainkan andil dari banyak pihak, dengan maksud mencapai program yang hendak dicapai. Model ini juga menjadi bentuk respons atas pelaksanaan program sebelumnya yang dinilai tidak efektif (Hidayatullah et al., 2023).

Gambar 1. Model *Collaborative Governance* Ansell & Gash



Sumber: (Pratiwi et al., 2024)

Sebagaimana model *Collaborative Governance* yang tertera dalam gambar di atas, memperlihatkan beberapa unsur yang mempengaruhi jalannya proses *Collaborative Governance*, diantaranya *Starting Condition*, *Facilitative Leadership*, *Institutional Design* dan *Collaborative Process* dengan beberapa sub-unsur di dalamnya seperti *Power-Resource*, *Incentives to Participate*, *Prehistory*, *Face to Face Dialogue*, *Trust Building*, *Commitment to Process*, *Share Understanding* dan *Intermediate Outcomes*. Berikut penjelasan mengenai masing-masing unsur tersebut:

1. *Starting Condition*, sebagai tahap awal sebelum pelaksanaan kolaborasi, menyangkut tantangan dan fasilitasi kolaborasi antar aktor, dengan sub-unsur *Power-Resource* menyangkut dengan ketimpangan sumber daya yang dapat menghambat kolaborasi, *Incentives to Participate* menyangkut keuntungan yang diperoleh setiap aktor pada tata kelola kolaboratif sebagai motivasi andil partisipasi, *Prehistory* menyangkut konflik masa lalu berpotensi meningginya konflik dan menurunnya tingkat keberhasilan kolaborasi, sebaliknya kolaborasi masa lalu yang berhasil, menciptakan kolaborasi yang baik (Dianti, 2022).
2. *Facilitative Leadership*, sebagai unsur krusial sebagai jembatan konflik dalam proses kolaborasi, sebagai pemersatu setiap aktor dalam menciptakan semangat kolaboratif, fasilitator komunikasi, serta memaksimalkan keuntungan bersama.
3. *Institutional Design*, menekankan aturan dasar sebagai pijakan dasar kolaborasi, dengan melibatkan partisipasi yang luas bagi setiap aktor dalam mendukung keberhasilan kolaborasi.
4. *Collaborative Process*, menekankan pada keberlangsungan praktik kolaborasi, menilai keberhasilan kolaborasi melalui siklus proses kolaborasi pada setiap sub-unsurnya, seperti *Face to Face Dialogue*, menyangkut kesepahaman bersama melalui interaksi antar muka bagi setiap aktor dalam sebuah forum, *Trust Building*, membangun kepercayaan bagi setiap aktor dalam



proses kolaboratif, *Commitment to Process*, menekankan pada komitmen setiap aktor dalam menjalankan proses kolaborasi, *Share Understanding*, menekankan pada kesepahaman bersama tentang tujuan bersama yang hendak dicapai bagi setiap aktor, *Intermediate Outcomes*, yakni hasil sementara dari pelaksanaan proses kolaboratif secara keseluruhan (Amelia & Priambodo, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial dan persoalan manusia dalam situasi alami (Murdiyantoro, 2020). Peneliti memilih metode ini untuk mengkaji persoalan rendahnya PAD Kota Serang dan upaya kolaboratif pemerintah melalui Banten Creative Festival (BCF) dalam mendorong ekonomi kreatif. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menggambarkan secara mendalam dinamika collaborative governance dalam pelaksanaan BCF. Studi kasus berfokus pada satu fenomena yang terikat oleh konteks waktu dan tempat, serta menggunakan berbagai sumber data (Farida, 2008)

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah melihat bentuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyelenggaraan BCF sebagai strategi peningkatan PAD melalui ekonomi kreatif. Penelitian dianalisis menggunakan teori *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) observasi partisipatif, di mana peneliti hadir langsung pada pelaksanaan BCF; (2) wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pejabat dinas terkait dan inisiator BCF, menggunakan teknik purposive sampling; serta (3) dokumentasi, termasuk dokumen publik dan privat yang relevan. Teknik analisis data terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode.

PEMBAHASAN

Deskripsi Ekonomi Kreatif di Kota Serang

Sejak tahun 2006 Indonesia mengalami perkembangan ekonomi kreatif. Keseriusan pemerintah pusat dalam menggarap ekonomi kreatif ini dipertegas dengan diubahnya Kementerian Pariwisata dengan digabungkan dengan sektor ekonomi kreatif pada 2019 melalui Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2019, menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi (Salmande, 2023). Ekonomi kreatif merupakan salah satu pendekatan pembangunan ekonomi baru yang menempatkan kreativitas, inovasi, dan ide sebagai aset utama dalam menciptakan nilai ekonomi. Dalam ekonomi kreatif, proses produksi dan distribusi lebih mengandalkan kemampuan intelektual dan ekspresi budaya dibandingkan sumber daya alam. Ekonomi kreatif merupakan luapan kreativitas pelaku usaha dalam menciptakan produk atau brand yang memiliki tujuan tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberdayakan masyarakat (Hasan et al., 2021; Hayati et al., 2021; Kustanti, 2022). Sumber daya manusia yang berupa kemampuan untuk berkreasi, menciptakan inovasi, dan nilai tambah akan menjadi sumber daya yang tidak akan ada habisnya.

Di tengah keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki Kota Serang, selain dari retribusi daerah, pajak daerah, dan wisata religi, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang memiliki



potensi strategis untuk mendorong kemandirian fiskal daerah dan membuka peluang kerja baru. Kota Serang memiliki pendapatan daerah yang berasal dari Kondisi fiskal Kota Serang masih menghadapi tantangan serius. Berdasarkan data BAPPEDA Provinsi Banten, PAD Kota Serang pada tahun 2024 hanya sebesar Rp206 miliar. Angka ini sangat kecil dibandingkan dengan kota/kabupaten lain seperti Kota Tangerang (Rp4,85 triliun), Kabupaten Serang (Rp3,44 triliun), atau bahkan Kota Cilegon (Rp1,2 triliun) (Rizaty, 2024). Sebagai ibu kota provinsi, angka ini memperlihatkan adanya ketimpangan kapasitas fiskal yang mencolok. Ketergantungan terhadap pajak dan retribusi lokal seperti hotel, restoran, dan parkir tidak mampu menopang APBD secara mandiri. Maka, Pemerintah Kota Serang perlu terus menggali potensi sektor lain, dan ekonomi kreatif menjadi salah satu jawabannya.

Berbeda dengan beberapa tahun lalu di mana perkembangan ekonomi kreatif di Kota Serang berjalan lambat, kini kota ini telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintah telah melaksanakan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaku ekonomi kreatif. Pelatihan tersebut meliputi manajemen usaha, fotografi produk, strategi pemasaran digital, hingga personal branding, yang secara bertahap meningkatkan daya saing pelaku lokal. Tidak hanya itu, pemerintah juga mulai menjalin kerja sama dengan sektor swasta dalam membangun ekosistem kreatif. Kerja sama ini terwujud melalui dukungan penyelenggaraan *event*, penyediaan tempat promosi, hingga kemitraan dalam mendukung akses pembiayaan dan pemasaran produk lokal.

Sebagai pelaksana urusan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang memiliki peran penting dalam menyiapkan kebijakan, menyelenggarakan pelatihan, dan melakukan fasilitasi terhadap pengembangan sumber daya manusia kreatif, infrastruktur, dan ekosistem pendukung lainnya. Selain itu, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan juga aktif dalam membina dan memfasilitasi UMKM kreatif melalui pelatihan, pemberian akses permodalan, serta memperluas pasar. Sinergi antar dinas ini menjadi fondasi penting untuk mengembangkan potensi lokal yang selama ini belum tergarap maksimal.

Dalam RPJMN 2025–2029, Provinsi Banten telah ditetapkan sebagai salah satu dari 15 daerah prioritas pengembangan ekonomi kreatif nasional (Muhtar, 2025). Ini membuka peluang besar bagi Kota Serang untuk menjadi pusat ekonomi kreatif di provinsi tersebut. Perubahan arah kebijakan ini menunjukkan bahwa Kota Serang tidak lagi berada pada tahap awal dalam pembangunan ekonomi kreatif. Ekosistem ekonomi kreatif mulai terbentuk, sinergi antara pemerintah dan swasta mulai terjalin, dan dukungan terhadap pelaku usaha kreatif semakin nyata. Meskipun tantangan masih ada, seperti ketimpangan promosi antar subsektor atau keterbatasan ruang ekspresi, namun arah kebijakan dan langkah konkret pemerintah menandai bahwa Kota Serang sedang bergerak menuju transformasi sebagai kota kreatif.

Banten Creative Festival

Banten Creative Festival (BCF) merupakan sebuah festival tahunan yang diselenggarakan dengan basis *collaborative governance* yang melibatkan pihak pemerintah daerah, dan juga swasta. BCF diselenggarakan di Kota Serang sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi masyarakat. Kota Serang, sebagai ibu kota Provinsi Banten, menghadapi tantangan struktural dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selama ini masih bergantung pada sektor-sektor konvensional seperti restoran, hotel, dan parkir (Gunawan & Suebah, 2022). Dalam konteks tersebut, BCF hadir sebagai alternatif strategis yang bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta komunitas kreatif lokal.



Sebagai ruang publik yang mengintegrasikan berbagai subsektor ekonomi kreatif, BCF menghadirkan beragam bentuk ekspresi dan apresiasi, mulai dari pertunjukan musik, seni rupa, seni pertunjukan, fashion, hingga kuliner. Salah satu daya tarik utama dari penyelenggaraan BCF adalah hadirnya konser musik yang menampilkan band-band ternama di tingkat nasional, yang mampu menarik ribuan pengunjung dari dalam dan luar daerah. Selain itu, festival ini juga menghadirkan sekitar 80 brand fashion, baik dari pelaku lokal Kota Serang maupun dari kota-kota lain, yang turut serta dalam pameran dan bazar kreatif (Antarfoto, 2025). Peristiwa ini menghasilkan perputaran ekonomi yang signifikan, terutama melalui transaksi yang dilakukan oleh pengunjung terhadap produk-produk UMKM dan industri kreatif yang terlibat. Terlebih BCF juga menjadi wadah bagi produk lokal (makanan, kerajinan, musik, band) untuk mempromosikan dan mengenalkannya kepada khalayak umum.

Inisiasi awal BCF berasal dari komunitas kreatif lokal dan diselenggarakan oleh *Event Organizer* Rumah Bersatu sebagai bentuk respons terhadap minimnya ruang hiburan dan fasilitas ekspresi seni budaya di Kota Serang. Seiring dengan meningkatnya dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan oleh kegiatan ini, Pemerintah Kota Serang mulai menunjukkan atensi dan keterlibatan aktif, khususnya melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) serta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DINKOPUKMPERINDAG). Keterlibatan pemerintah tidak terbatas pada aspek regulasi, tetapi juga mencakup fasilitasi teknis, penyediaan sarana promosi, pelatihan bagi pelaku UMKM, hingga kemudahan perizinan untuk mendukung keberlangsungan acara.

Model kolaborasi antara penyelenggara BCF, komunitas kreatif, pelaku UMKM, dan pemerintah daerah ini mencerminkan implementasi *collaborative governance* dalam pembangunan ekonomi kreatif. Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat posisi pemerintah sebagai fasilitator pembangunan yang inklusif, serta mendorong terciptanya ekosistem kreatif yang partisipatif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun daya saing daerah melalui pendekatan ekonomi kreatif.

Dengan pendekatan tersebut, BCF tidak lagi semata-mata menjadi ajang hiburan tahunan, melainkan telah berkembang menjadi instrumen pembangunan daerah yang signifikan. Festival ini berkontribusi terhadap peningkatan PAD melalui sektor-sektor non-konvensional, membuka peluang kerja dan usaha baru, serta memperkuat identitas kultural masyarakat Kota Serang dalam kerangka pembangunan ekonomi yang berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, keberlanjutan dan pengembangan BCF perlu terus didorong melalui kebijakan publik yang adaptif dan berbasis kolaborasi multi pihak (BANTENESIA, 2025).

Jika ditinjau berdasarkan teori *collaborative governance* oleh Ansell & Gash (2008), *event-event* seperti BCF adalah bentuk implementasi forum dialog secara inklusif melalui partisipasi komunitas kearifan lokal, pemerintah kota, dinas pariwisata, dan juga pihak swasta yang menjadi pengembang *event*. Kemudian juga bentuk komitmen antara pemerintah dan pelaku industri kreatif dalam mengupayakan kondisi ekonomi kreatif yang jauh lebih baik. Lalu hasil kolaboratif yang nyata dalam bentuk promosi, jejaring, dan peningkatan UMKM kreatif. Pada sub bab berikut ini penulis akan mengeksplorasi bagaimana bentuk-bentuk *collaborative governance* yang dilakukan Pemerintah Kota Serang dengan berbagai pelaku swasta yang tergabung dalam penyelenggaraan BCF menggunakan kerangka analisis Ansell & Gash (Ansell & Gash, 2008)



1. *Starting Condition*

Sebagaimana dalam hal tersebut menjadi langkah awal dalam proses kolaborasi, di mana terdapat pertimbangan menyangkut ketimpangan sumber daya, keuntungan antar pihak kolaborator, hingga konflik. Sebagaimana temuan penelitian, bahwa kolaborasi ini terjalin dengan beberapa pihak di antaranya ialah pihak pemerintah dan pihak swasta, dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Rumah Bersatu selalu pihak Banten Creative Festival. Kesamaan tujuan melatarbelakangi kolaborasi, yakni semangat dalam meningkatkan ekonomi kreatif di Kota Serang, Banten. Pemerintah melalui Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan bersama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentunya memiliki semangat yang sama ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang, sekaligus memberdayakan pelaku usaha ekonomi kreatif yang ada. Sementara itu, pihak swasta melalui Rumah Bersatu tentu memiliki motif ekonomi dengan memperluas ekspansi perusahaannya melalui *event* industri kreatif.

Terdapat tantangan yang berpotensi menimbulkan konflik, di mana tidak ada mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara *event*, Rumah Bersatu terhadap pemerintah Kota Serang. Di sisi lain, hal ini juga menjadi hal baru bagi pemerintah terlibat dalam kolaborasi antar sektor, khususnya industri kreatif, sehingga tentu tak bisa menafikkan akan terjadinya potensi ketimpangan, mengingat kolaborasi ini baru terjalin pada periode tahun 2024. Kesiapan sumber daya infrastruktur juga turut menghiasi persoalan yang ada, di mana tidak adanya fasilitas ekonomi kreatif yang memadai di kota serang, layaknya BSD dan PRJ. Dengan kata lain, motif ekonomi tentu menjadi tujuan dari pihak penyelenggara *event* BCF dan pemerintah bertujuan untuk melibatkan UMKM binaannya agar turut serta membantu meningkatkan PAD, lantaran kota serang tidak memiliki PAD yang memadai, sementara industri lain tidak cukup bisa diandalkan, sehingga UMKM dinilai menjadi solusi atas minimnya PAD Kota Serang, sekaligus sebagai alternatif solusi atas kurangnya industri yang dapat mendukung pendapatan daerah Kota Serang.

Maka dari itu, pemerintah melalui Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dengan pelaku swasta Banten Creative Fest (BCF) perlu untuk melakukan kolaborasi dengan mempertimbangkan aspek transparansi dan akuntabilitas serta menjaga komunikasi agar tetap terjalin dengan baik, sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik dan ketimpangan kepentingan dan sumber daya. Mengingat, efektivitas kolaborasi dapat menentukan keberhasilan jalinan kolaborasi sekaligus menciptakan sinergitas yang kuat dalam mendukung cita-cita peningkatan industri ekonomi kreatif dan juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang yang ditopang oleh industri ekonomi kreatif, dengan tetap memperhatikan asas keuntungan bersama. Dengan demikian, seluruh pihak kolaborator penting untuk bersama-sama tetap menjaga komunikasi agar terus berjalan secara optimal. Pentingnya kolaborasi yang baik juga tercermin dari Dinas Koperasi UMKM Perindustrian yang mampu memberdayakan UMKM kota serang, sekaligus kemampuan Dinas Pariwisata dalam mengelola ekonomi kreatif kota serang yang perlu untuk diperhitungkan.

Pengalaman yang dimiliki oleh setiap kolaborator baik itu Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Serang, Dinas Pariwisata, dan BCF melalui Rumah Bersatu selaku pihak swasta penting untuk dipertimbangkan, lantaran pengalaman dari berbagai pihak kolaborator dapat menentukan efektivitas kolaborasi yang berdampak pada



peningkatan signifikan dalam hal pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan pendapatan daerah kota serang. Lebih lanjut, pelibatan setiap unsur yang dilakukan oleh perwakilan pemerintah melalui Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pariwisata bukan hanya dapat menguntungkan pelaku swasta BCF dalam meraup pendapatan melalui penjualan tiket, tetapi juga membantu para UMKM binaan untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang signifikan tanpa harus mengeluarkan modal, lantaran modal telah ditanggung oleh dinas pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa awal kerja sama yang baik bukan hanya tercipta dari kesan pertemuan pertama kerja sama, melainkan juga perlu mempertimbangkan asas pengalaman masing-masing pihak dalam mengelola kegiatan serupa di masa lalu, sehingga pertimbangan itu dapat menjadi dasar bagi awal jalinan kerja sama yang menguntungkan bagi semua pihak kolaborator.

Pada hakikatnya, kolaborasi dalam pelaksanaan Banten Creative Fest ini, persepsi masyarakat juga turut mempengaruhi kondisi awal (*starting condition*) dalam pelaksanaan kerja sama ini. Persepsi setiap aktor dalam pelaksanaan kolaborasi sangat menentukan fondasi kerja sama yang berkelanjutan. Perlu dicatat bahwa, ketika setiap unsur aktor kolaborasi merasa memiliki hak yang sama untuk dihargai dan dipercaya untuk menyampaikan segala bentuk aspirasinya, maka komitmen akan segera tercipta bagi setiap aktor dalam menjalankan perannya masing-masing, dengan begitu hasil yang dicapai akan lebih maksimal. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak menyadari untuk memetakan segala bentuk potensi dan hambatan sedari awal melalui keterbukaan komunikasi yang baik. Tak hanya itu, pembagian peran secara jelas juga turut mendukung keberhasilan, agar kolaborasi yang berjalan tidak hanya formalitas semata, melainkan benar-benar bisa memberikan peran sentral bagi setiap aktor sejak awal diadakan kolaborasi. Pasalnya, pembagian peran yang fungsional akan membantu setiap pihak mencapai tujuan yang lebih terarah dan nyata dalam mencapai tujuan peningkatan ekonomi daerah kota serang melalui peningkatan ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM.

Sebagai daerah dengan minim sumber daya alam, kota serang tentu perlu mempersiapkan alternatif lain pemasukkan pendapatan asli daerah. Dalam mencapai hal tersebut, bukan hanya kolaborasi yang perlu ada, tetapi bagaimana menciptakan kolaborasi tersebut, awal yang baik dalam pelaksanaan kolaborasi akan sangat membantu lebih jauh bagi kota serang memperoleh pendapatan asli daerah yang bukan hanya memanfaatkan sektor jasa, tetapi juga dapat memaksimalkan sektor ekonomi kreatifnya. Mengingat, ekonomi kreatif yang stabil sebagaimana dinyatakan dalam beberapa studi, dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebagai kota minim industri, momentum ini harus dijaga dan ditingkatkan dengan memaksimalkan kesempatan kolaborasi dengan berbagai aktor menjadi sesuatu yang benar-benar bernilai dan menghasilkan output yang dapat dinikmati bagi setiap aktor, bahkan untuk jangka panjang dapat meningkatkan perekonomian kota serang secara berkelanjutan. Perekonomian yang berkelanjutan tentu semakin mendorong geliat aktivitas UMKM Kota Serang yang semakin aktif dan turut membantu ekonomi kota serang, itu semua tentu dimulai dari kondisi awal yang baik dalam melaksanakan kolaborasi.

2. *Facilitative Leadership*

Facilitative Leadership atau kepemimpinan fasilitatif menjadi hal yang krusial dalam penjalinan kolaborasi antar sektor, mengingat potensi konflik karena berbagai pandangan dan kepentingan. Tentu hal ini menjadi perlu dengan adanya kepemimpinan yang dapat menjadi jembatan konflik antar pihak. Dalam penerapan kolaborasi Banten Creative Festival, Walikota



Serang, selaku pemilik visi atas pembangunan daerah Kota Serang, tentu menjadi motor penggerak utama bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah/ Dinas terkait, dengan memintanya agar tidak hanya menjadi objek, tetapi juga menjadi aktor penggerak dalam ekosistem kolaborasi antar sektor ini. Melalui RPJMD, visi tersebut dituangkan oleh Dinas Terkait sebagaimana instruksi yang diberikan untuk dapat memfasilitasi para pelaku usaha ekonomi kreatif agar turut serta berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah kota serang. Hal ini menjadi cerminan penting bahwa kepemimpinan menjadi aspek krusial dalam memastikan jalannya kolaborasi dapat mendorong semangat yang sama bagi setiap pihak, di tengah banyaknya kepentingan, yakni sama sama ingin meningkatkan perekonomian daerah kota serang.

Pendelegasian yang dilakukan oleh kepala dinas kepada staf yang berkecimpung di ranah terkait ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM, yang bertugas dalam memastikan keterlibatan UMKM dan/atau pelaku usaha, turut mencerminkan kepastian kepemimpinan yang sangat fasilitatif, bukan hanya untuk menjembatani para pelaku usaha, tetapi juga turut andil dalam menjembatani proses kerja sama antar pihak penyelenggara (Banten Creative Festival). Sebagai contoh, melalui *event* Banten Creative Festival, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang turut serta melakukan “bakar duit”, guna memberdayakan UMKM dengan melibatkannya pada *event* tersebut, melalui fasilitasi *booth* yang seluruhnya ditanggung oleh pemerintah, sehingga memungkinkan pelaku UMKM untuk memperoleh kesempatan meraup keuntungan, tanpa mengeluarkan modal untuk sewa *booth*. Selain itu, kepemimpinan Fasilitatif juga tercermin dalam mengatur kategorisasi *booth* dalam *event* tersebut yang menempatkan *booth* UMKM Kota Serang pada posisi yang strategis, hal ini tentu menjadi cerminan bahwa kepemimpinan Fasilitatif terlihat melalui hal hal demikian.

Kepemimpinan fasilitatif yang efektif bukan hanya soal pengelolaan kegiatan Banten Creative Fest, melainkan juga dapat memastikan setiap unsur kolaborator yang menjalin kerja sama dapat sama-sama tercipta sinergitas jalinan kerja sama yang kuat dan berujung pada kerja sama berkelanjutan. Dengan demikian, penting untuk memperhatikan aspek kepemimpinan fasilitatif, lantaran berdampak pada produktivitas kolaborasi pelaksanaan *event* Banten Creative Fest, sehingga berpeluang besar untuk memperoleh capaian yang maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah sekaligus meningkatkan dan memberdayakan para pelaku UMKM di kota serang. Mengingat, kepemimpinan yang berjalan dengan optimal akan mampu melibatkan dan menarik banyak partisipasi masyarakat, sehingga hal demikian akan menguntungkan para pihak penyelenggara termasuk para pelaku UMKM binaan.

Peran kepemimpinan yang fasilitatif dapat menciptakan ekosistem yang baik bagi jalannya kolaborasi Banten Creative Fest, terutama dalam konteks pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di kota serang. Namun demikian, untuk mendapatkan kepemimpinan yang fasilitatif, tentu setiap aktor perlu untuk memperkuat dan mengembangkan kapasitas masing-masing pemangku kepentingan dalam jalinan kolaborasi yang berjalan. Sehingga pemimpin bukan hanya fasilitatif, namun juga dapat adaptif yang akan semakin meningkatkan peluang keberhasilan. Kepemimpinan yang fasilitatif sekaligus adaptif tentu akan sangat membantu dan memudahkan bagi setiap pihak kolaborator kegiatan Banten Creative Fest dapat menciptakan iklim kerja sama yang optimal.

Kepemimpinan fasilitatif juga turut mendorong hadirnya kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif sekaligus berempati dalam menjadi jembatan bagi setiap aktor



yang memiliki perbedaan latar belakang, kepentingan, serta visi yang berbeda. Dalam hal ini, konteks Banten Creative Fest, peran kepemimpinan bukan hanya sebagai simbolisme semata tetapi juga aktif untuk melakukan pemetaan terhadap potensi dan analisis kebutuhan bagi setiap aktor dalam kolaborasi, baik itu untuk pemerintah, pelaku UMKM, maupun pihak penyelenggara kegiatan yakni rumah bersatu. Pasalnya, pemimpin dengan kemampuan analisis lapangan yang baik, akan mendorong partisipasi yang setara dan seimbang untuk semua aktor kolaborator. Sehingga hal ini dapat menghindari dominasi dari salah satu diantara aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Lebih lanjut, kepemimpinan fasilitatif dapat mencerminkan fleksibilitas saat melakukan respons terhadap situasi yang dapat ditangani dengan segera.

3. *Institutional Design*

Dalam bagian ini penulis berusaha mengeksplorasi bagaimana collaborative governance dengan indikator Institutional Design yang menekankan aturan dasar sebagai pijakan dasar kolaborasi, dengan melibatkan partisipasi yang luas bagi setiap aktor dalam mendukung keberhasilan kolaborasi (Prawestari, 2021), berdasarkan rules of engagement atau aturan main, penetapan proses kolaborasi didasari oleh MoU antara pihak pemerintah Kota Serang dengan Panitia BCF sehingga pada praktiknya kolaborasi tersebut belum diatur secara legal formal melalui peraturan, MoU yang belum diratifikasi membuat pedoman peran dan tanggung jawab antar aktor tidak berjalan secara bersamaan, ketiadaan aturan main yang jelas dapat menyebabkan kerentanan dan manipulasi dalam proses kolaborasi, Ansell dan Gash berpendapat bahwa kolaborasi yang belum memiliki aturan pasti berisiko menjadi pragmatis dan personalistik (Ansell & Gash, 2008) dalam segi inklusivitas dan transparansi: keterlibatan dalam penyelenggaraan inklusif secara parsial terhadap UMKM binaan, namun secara transparansi lemah dengan minimnya laporan keuangan yang didapatkan, hal ini terjadi akibat MoU tidak mengaturnya, sehingga pemerintah kota tidak dapat melihat dampak langsung secara statistik keuntungan maupun laporan resmi.

Kolaborasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan BCF belum diratifikasi menjadi peraturan yang pasti, Pemerintah Kota Serang baru memasuki tahapan program dan bukan kebijakan yang melegitimasi berbagai kolaborasi selanjutnya, dalam perspektif Ansell dan Gash aturan main mengidentifikasi kolaborasi sebagai sebuah komitmen dan tanggung jawab, para aktor kolaborasi hadir bukan hanya untuk menyelesaikan proses-proses acara, namun juga melaksanakan kewajiban yang mengikat untuk terus melaksanakan kolaborasi. Keterikatan ini menimbulkan proses kolaborasi yang berkelanjutan dan akan menjadi lebih baik kedepannya. BCF adalah hasil dari fenomena anak muda yang mengekspresikan berbagai bakat dan hobi, apabila dilaksanakan secara serius maka akan menjadi sebuah program pembangunan yang memberikan pemerintah Kota Serang dana segar akibat perputaran uang yang terjadi, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan setidaknya jumlah perputaran yang terjadi bisa mencapai 2 miliar rupiah selama 7 hari. Keuntungan ini dapat menjadi solusi dari macetnya pendapatan daerah yang terbilang minim dibandingkan ibu kota lainnya. Aturan main digunakan tidak hanya untuk menghindari permasalahan di masa depan, namun juga memberikan rasa keamanan bagi seluruh pihak dalam menginvestasikan berbagai asset dalam proses kolaborasi.

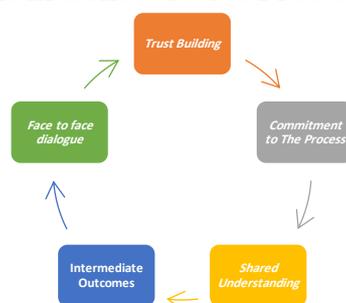
4. *Collaborative Process*

Dalam bagian ini, penulis akan mengeksplorasi bagaimana ketekaitan *stakeholders* dengan aktor-aktor lain dalam melaksanakan BCF berdasarkan gagasan *Collaborative*



Governance karya Ansell dan Gash, keberhasilan *Collaborative Process* ditentukan melalui lima variabel yaitu; 1) *Face-to-Face Dialogue* 2) *Trust Building* 3) *Commitment to the Process* 4) *Shared Understanding* 5) *Intermediate Outcome* (Ansell & Gash, 2008). Kelima dimensi ini masing-masing mencerminkan bagaimana para aktor yang terlibat dalam menjalankan kerja sama, membangun kepercayaan serta komitmen dalam prosesnya, serta memahami keseluruhan proses yang dilaksanakan sedari kesepakatan dibuat hingga hasil sementara dalam proses kolaborasi terlihat. (Kurniawan et al., 2022; Suparmoko, 2020; Wijaya et al., 2024).

Gambar 1. Bentuk Collaborative Process dalam Collaborative Governance



Sumber: Dikerangka penulis berdasarkan (Ansell & Gash, 2008)

Berdasarkan gambar 1 di atas dalam sub-indikator *Face to face dialogue* para stakeholders memiliki keterlibatan sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi, menghormati dan berkolaborasi terhadap proses yang akan dilaksanakan (Anang Sugeng Cahyono, 2021), keberadaan dialog secara langsung merupakan awal fundamental dalam melaksanakan kolaborasi, Ansell dan Gash menyebut bahwa aktivitas ini bertujuan untuk membangun kerja sama serta menghilangkan stereotip yang ada dalam masing-masing aktor (Ansell & Gash, 2008). Untuk menjalankan kegiatan kolaborasi dalam melaksanakan BCF di Kota Serang diperlukan kesepakatan awal yang dihasilkan oleh dialog tersebut, masing-masing dari Walikota melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DINKOPUKMPERINDAG), Dinas Pariwisata dan Olahraga (DISPARPORA), Para UKM dan aktor kesenian, tim BCF serta para pengisi tenant memiliki berbagai peran tersendiri untuk mensukseskan acara tersebut,

Proses kolaborasi ini diawali dengan cara yang unik dan tidak biasa, dalam studi (Putra & Herawati, 2024) proses kolaborasi diawali dengan hasil musyawarah dan konsensus formal sementara dalam studi (Putra et al., 2022) kolaborasi diinisiasi oleh kekhawatiran akan potensi maksimal yang belum di maksimalkan. Proses terciptanya kerja sama pemerintah kota dengan BCF diawali dengan interaksi informal melalui “nongkrong bareng”. Lambat laun komunikasi terus berjaln hingga terciptanya dialog serius dengan mulai adanya atensi pemerintah dalam menginisiasikan kerja sama, sehingga terjadinya dialog merupakan mekanisme non-formal dimana biasanya proses kolaborasi diawali sebagai bentuk kekhawatiran, oportunistis dan kewajiban (Noor et al., 2022). Dialog tatap muka merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan dan menyelesaikan konflik. Dalam kasus ini, tidak adanya forum formal di awal menandakan bahwa kolaborasi berkembang secara organik dan berbasis relasi personal, keuntungan yang didapatkan adalah fleksibilitas dan spontanitas murni, tapi kekurangannya adalah lemahnya akuntabilitas dan sulitnya melembagakan kolaborasi.

Dalam sub-indikator *Trust Building*, Ansell dan Gash menyebut aktivitas ini pada dasarnya bertujuan untuk menghindarkan konflik di masa depan (Ansell & Gash, 2008). Kepercayaan tidak



bisa langsung hadir dalam proses kolaborasi, terlebih dalam prosesnya hal ini bukan hanya terkait tawar menawar aktivitas dan peran, kepercayaan dalam kolaborasi membutuhkan waktu untuk tumbuh (Wijayanti & Kasim, 2022), dalam kolaborasi ini proses membangun kepercayaan antara para aktor yang terlibat diawali dengan melihat citra dan latar belakang masing-masing, berkoordinasi dan berkomunikasi secara terus menerus serta melaksanakan kegiatan bersama dalam setiap agenda pertemuan tanpa meninggalkan perannya, Pemerintah Kota melalui dinas-dinasnya memiliki tanggung jawab sebagai inisiator dalam memasukan aktor tenant dan BCF bertanggungjawab dalam menyediakan tenant-tenant tersebut, dalam prosesnya, pemerintah menyediakan program-program seperti HAKI dan pembuatan nomor usaha induk gratis sebagai jaminan bahwa tenant tidak akan diisi oleh sembarang pihak, BCF sebagai pelaksana juga memberikan kemudahan pemerintah kota dalam menggratiskan tenant-tenant tersebut untuk diisi, sehingga kerja sama yang dilakukan sangat didasari oleh MoU yang telah disepakati, terlebih dalam prosesnya pemerintah kota juga tidak mengintervensi secara langsung bagaimana aktivitas keuangan kepanitiaan BCF, yang mengindikasikan kepercayaan dalam tiap-tiap aktor.

Dalam sub-indikator *Commitment to The Process* merupakan aktivitas para stakeholders dan aktor-aktor yang terlibat dalam menunjukkan komitmen yang mendukung keberlangsungan acara, komitmen ini diawali dengan hasil keputusan pemerintah kota yang menilai penyelenggaraan BCF sejalan dengan visi-misi dan RPJMD Kota Serang. Walikota merupakan aktor kunci dalam aktivitas ini sebagai pengambil keputusan utama dalam mendelegasikan peran kolaboratif kepada Dinkopukmperindag dan Disparpora, sehingga memastikan komitmen tidak hanya didasari keuntungan namun juga percepatan kesejahteraan pelaku UMKM yang tersebar di Kota Serang, namun kekurangan yang didapatkan ialah MoU ini hanya bersifat sementara dan belum ada peraturan teknis yang memastikan keberlanjutan kolaborasi dalam periode kepemimpinan selanjutnya, sehingga komitmen kolaborasi bisa jadi terhenti.

Menurut pandangan Ansell dan Gash dalam aktivitas ini menjelaskan bahwa komitmen tidak cukup hanya bersifat simbolis dan politis, menurutnya keberadaan komitmen institusional sangat penting dalam melanjutkan kerja sama yang terjadi, (Ansell & Gash, 2008; Mafaza & Setyowati, 2020) sehingga meskipun kepemimpinan telah berubah, pemerintah sebagai stakeholders mempunyai kekuasaan lebih dalam melaksanakan komitmen yang mengikat, meskipun saat ini masih cenderung lemah, namun besar kemungkinan kolaborasi serupa akan tetap dijalankan meskipun dengan mitra kolaborasi yang berbeda. (Suparmoko, 2020).

Dalam sub-indikator *Shared Understanding* diperlukannya sebuah pemahaman mendasar yang disepakati para stakeholders dan aktor yang terlibat bertujuan dapat dinilai berdasarkan tujuan dan misi yang jelas (Kurniawan et al., 2022), aktivitas ini tidak akan berjalan tanpa proses kolaborasi di tahapan-tahapan sebelumnya seara maksimal. *face to face dialogue* yang berjalan mampu mengatasi berbagai kemungkinan kesalahpahaman yang terjadi sehingga didapati bahwa pemahaman yang terjadi cukup maksimal, kebijakan kolaboratif yang diawali dari “nongkrong bareng” sukses dilakukan selama 7 hari BCF dilaksanakan. Dalam sub-indikator *Intermediate Outcomes* ditemukan bahwa tujuan awal kolaborasi telah terpenuhi, yaitu membuka lapangan usaha bagi para UMKM, menaikkan popularitas bisnis lokal Kota Serang, serta menaikkan PAD sebagai tujuan utama, namun “*small wins*” ini perlu ditindaklanjuti sebagai pengembangan bersama bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama bagi pemerintah Kota Serang yang terbantu akibat pendapatan daerah naik signifikan.



KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance dalam penyelenggaraan Banten Creative Festival (BCF) di Kota Serang menjadi strategi yang potensial dalam meningkatkan ekonomi kreatif serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku swasta (Rumah Bersatu), komunitas kreatif, dan pelaku UMKM berhasil membentuk sinergi lintas sektor yang tidak hanya menghasilkan ruang ekspresi budaya, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi nyata.

Melalui analisis teori Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008), kolaborasi dalam BCF memenuhi beberapa indikator penting, mulai dari kondisi awal yang mencerminkan kesamaan tujuan antar aktor, kehadiran kepemimpinan fasilitatif yang menjembatani kepentingan, hingga proses kolaborasi yang ditandai dengan dialog langsung, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama. Meskipun demikian, kelemahan dalam desain institusional masih ditemukan, terutama pada belum adanya dasar hukum formal seperti peraturan daerah atau kontrak legal yang mengikat antar pihak kolaborator. Hal ini menyebabkan kerentanan dalam kesinambungan kolaborasi dan minimnya akuntabilitas, khususnya dalam aspek transparansi laporan keuangan dan evaluasi program.

Secara umum, keberadaan BCF telah memberikan kontribusi konkret terhadap penguatan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Serang, dengan dampak langsung berupa pemberdayaan UMKM, promosi produk lokal, hingga peningkatan perputaran ekonomi daerah. Namun untuk menjamin keberlanjutan kolaborasi, diperlukan penguatan kerangka kelembagaan, perluasan pelibatan aktor, serta kebijakan publik yang bersifat adaptif dan legalistik. Oleh karena itu, model kolaboratif seperti BCF perlu terus dikembangkan dengan memperkuat regulasi, komunikasi antaraktor, dan evaluasi berkelanjutan agar menjadi praktik terbaik dalam tata kelola ekonomi kreatif daerah yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Affriandy, F. (2025). Creative Festival (BCF) 2025 Dibuka Gubernur Banten. *Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten*. <https://satpolpp.bantenprov.go.id/berita/creative-festival-bcf-2025-dibuka-gubernur-banten>
- Akurat, M. R. (2025). Banten Creative Fest 2025 Kembali Hadir di Alun-Alun Barat Kota Serang, Belanja Murah Sambil Nonton Konser Musik, Cek Tanggalnya! *Jakarta Akurat*. https://jakarta.akurat.co/kawasan/1315734935/banten-creative-fest-2025-kembali-hadir-di-alun-alun-barat-kota-serang-belanja-murah-sambil-nonton-konser-musik-cek-tanggalnya#google_vignette
- Ananda, D. Y., & Yudhistira, M. H. (2021). Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dan Kinerja Sektor Ekonomi Kreatif di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 16(1). <https://doi.org/10.21002/jke.2021.01>
- Anggraini, P. (2024). Konser Musik Menggeliat Lagi, Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah. *Detik.Com*. <https://www.detik.com/pop/music/d-7209503/konser-musik-menggeliat-lagi-indonesia-siap-jadi-tuan-rumah>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Antarfoto. (2025). *Banten Creative Festival 2025*.



- BANTENESIA. (2025). *Banten Creative Festival: Ramadhan Sale 2025, Diskon Hingga 80% dan Konser Musik Spektakuler!*
- Budhiyanto, A., & Maksum, Z. (2025). Banten Creative Festival 2025. *Antarafoto*. <https://www.antarafoto.com/id/view/2483201/banten-creative-festival-2025>
- Disporapar Paser. (2024). Mengenal 17 Sub Sektor Ekonomi Kreatif. *Diskominfo Kabupaten Paser*. <https://pss.paserkab.go.id/readmore/947#:~:text=Ke-17 subsektor pada Bidang,pertunjukan%2C penerbitan%2C dan aplikasi>.
- Farida, N. (2008). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa, 1(1)*, 305.
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 9(1)*, 69–80. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1212>
- Gunawan, I., & Suebah, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Serang. *Journal Management Retail, 02(1)*, 54–77.
- Hasan, M., Noercahyo, A., Rani, A. E., Salshabilla, N. A., & Izzati, S. N. (2021). Pengembangan Ekonomi Kreatif Sektor Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan, 9(2)*, 125–138. <https://doi.org/10.26740/jepk.v9n2.p125-138>
- Hayati, K., Manajemen, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Sinergisitas Dengan Bumdes Dan Desa Pintar (Smart Village). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 17(3)*, 170–182.
- Kustanti, R. (2022). Pengembangan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Jepara. *Jurnal Ekobistek, 11*, 239–244. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i3.366>
- Muhlimi, N. (2024). PAD Kota Serang Rendah, Begini Kata Pengamat Ekonomi. *Radar Banten*. <https://www.radarbanten.co.id/2024/10/21/pad-kota-serang-rendah-begini-kata-pengamat-ekonomi/>
- Muhtar, S. . (2025). *Gubernur Banten Andra Soni :Ekonomi Kreatif Salah Satu Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi*.
- Murdiyantoro, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal). In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- PortalBanten. (2025). *Hadiri Banten Creative Festival 2025: Gubernur Banten Optimis Dorong Ekonomi Daerah*. PortalBanten.Net.
- Provinsi Banten. (2025). Gubernur Banten Andra Soni: Ekonomi Kreatif Salah Satu Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi. *Portal Resmi Provinsi Banten*. <https://bantenprov.go.id/index.php/berita/gubernur-banten-andra-soni-ekonomi-kreatif-salah-satu-tulang-punggung-pertumbuhan-ekonomi>
- Rahmadanti, R. A., & Fitriana, K. N. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN KULON PROGO (STUDI KASUS GERAKAN BELA- COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN KULON PROGO (STUDI KASUS GERAKAN BELA-BELI Kabupaten Kulon Progo mer. *JOURNAL OF PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION RESEARCH, 01(02)*.
- Rizaty, M. A. (2024). *Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang 10 Tahun Terakhir hingga 2023*.
- Sandi, F. A., Putro, Y. L. C. A., Afriyanti, R., Parassa, H. S., & Priyanto, A. (2025). Kolaborasi



- antar stakeholder dalam mengembangkan pasar rakyat payungi kota metro. *Journal Publicuho*, 8(1), 39–56.
- Selatsunda, R. (2023). *Banten Creative Festival Berjalan Sukses, Bukukan Transaksi Hingga Rp 18 Miliar*. Selatsunda.Com.
- Utami, K., & Sayyidi. (2023). Lembaga Pers Mahasiswa Inkadha Sumenep Ditinjau Dari. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Syari'ah*, 06(02).
- Velby, A. C., & Yuadi, I. (2023). META-ANALITIK COLLABORATIVE GOVERNANCE. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 8(1), 19–41.
- Yuliani, D., Nursetiawan, I., Taufiq, O. H., & Sujai, I. (2023). PELAKSANAAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN KELOMPOK EKONOMI KREATIF. *Journal of Management Review*, 7(3), 965–972.